

Bela Negara, Bela Bangsa dan Bela Agama

Oleh Gatut Priyowidodo

Terminologi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Secara verbal formalitas heboh wacana bela negara ini mestinya sudah tuntas sejak 13 tahun lalu ketika UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diratifikasi DPR.

Namun sayang dalam kurun lebih dari satu dasa warsa tersebut implementasi bela negara tak kunjung diusik pada tataran praktis. Dua kali Presiden SBY yang mantan tentara menjabat pun bergeming untuk mau melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Baru ketika Jokowi seorang sipil yang Presiden berani pasang badan untuk menyegerakan pelaksanaan bela negara. Semua ramai-ramai bersuara. Terlebih lagi baru pada tahap awal saja dilatih 4500 kader di 45 kabupaten/kota yang menelan anggaran Rp 45 miliar semua terbelalak. Lalu muncul beragam tanda tanya, adakah Jokowi sedang menghidupkan kembali spirit militerisme melalui wajib militer dalam wajah bela negara?

Landasan Implementasi

Lebih rinci lagi bila dirunut dari UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) :” Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara”. Serta dilengkapi Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :”Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung”. Maka sikap dan tindakan bela negara secara konstitusional adalah kewajiban setiap manusia yang merasa dirinya bernegara dan berbangsa Indonesia.

Terlebih lagi bila disandingkan dengan bunyi amanat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6B :” Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Serta dikuatkan dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) :” Setiap Warga Negara Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”. Plus Ayat (2) yang menyatakan bahwa :” Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui; Pendidikan Kewarganegaraan, Pelatihan dasar kemiliteran, Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan Pengabdian sesuai dengan profesi, maka seperti halnya bela negara adalah kewajiban (*compulsory*) dan bukan pilihan (*optional*).

Karena sifatnya *compulsory* maka melekat di dalamnya adalah status kewarganegaraan yang tidak dapat dipisahkan dari atribut kebangsaan. Negara boleh beda karena proses diaspora, tetapi cinta pada tanah air adalah pengalaman emosional-psikologis yang melekat pada diri setiap anak bangsa dimanapun saat ini mereka berada. Contoh aktivitas yang bisa disebut misalnya melestarikan budaya, belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan-aturan negara, mencintai produk-produk dalam negeri.

Sebab spektrum bela negara sangat luas, maka negara harus kerja keras sekaligus kerja cerdas agar implementasi amanat undang-undang ini menjadi kesadaran kolektif bangsa yang dapat diandalkan. Sekilas apa yang dilakukan Kementerian Pertahanan dengan melakukan kaderisasi di Rindam Kodam terkesan dipaksakan dan amat pragmatis, tentu dilain waktu ada kesempatan untuk mengkoreksi. Namun langkah terpenting adalah setiap keputusan politik hendaknya dilaksanakan dulu sambil ada penyempurnaan. Contoh kongkrit, bila *space of domain* (ruang lingkupnya) adalah pendadaran ideologi lewat pendidikan, maka serahkan saja tanggung-jawab ini kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sangat dimengerti, mengapa Kemenhan menginisiasi proyek ini, tidak lain agar terjadi sinkronisasi kekuatan hankam baik pada level masyarakat sebagai penopang hankamrata di satu sisi dan militer sebagai kekuatan inti pada sisi yang lain.

Kekuatan inti yang terbatas pada Angkatan Darat, Laut, Udara dan Polri yang jumlahnya tidak lebih dar 1 juta personel tentu dirasa sangat tidak mencukupi untuk kondisi Indonesia yang terdiri atas 17 ribu pulau. Maka metode strategis yang harus dilakukan adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai kekuatan cadangan yang menjadi penyangga utama TNI. Bila bela negara tidak identik dengan wajib militer, dalam tataran tertentu dapat dimengerti. Namun jika esensinya adalah mempersiapkan kekuatan sipil sebagai kekuatan cadangan strategis militer bila sewaktu-waktu dibutuhkan tentu mengatakan ada kemiripan tujuan diantara dua konsep tersebut adalah penjelasan yang logis dan dapat diterima nalar.

Tantangan Berat

Demokrasi harus menghargai perbedaan adalah argumentasi final dan tak perlu diperdebatkan. Namun mengelola Indonesia dengan geografis yang lebih besar dari Eropa dan populasi yang nomor empat terbesar di dunia, tentu bukan persoalan yang mudah. Jika mau dibuka kontak pandora dengan inventarisasi empat persoalan bangsa mencakup ideologi, identitas, budaya dan arah ekonomi saja, barangkali energi bakal habis dan kesepakatan tak kunjung tiba. Bukan berarti saya menyetujui otoritarianisme dalam pengambilan keputusan, sama sekali tidak. Namun proses pengambilan keputusan yang dipimpin dengan resistensi rendah dan tidak berbelit, patut dikedepankan. Mengapa? Sekali lagi kita tidak boleh sibuk dengan urusan internal yang tak berujung. Tidak lagi di depan mata, sekarang tantangan sudah beriringan dengan kita. Tak ada lagi waktu. Nato atau omdo, sudah bukan eranya lagi. Sekarang waktunya bertindak dan mengeksekusi. Inipun sejatinya sudah sangat terlambat.

Pada tataran seperti itulah urgensi aksi bela negara kita letakkan. Sebagai sebuah bangsa yang besar, infiltrasi beragam pengaruh ideologi yang destruktif sangat rentan masuk ke wilayah pemikiran anak-anak muda Indonesia. Provokasi dan beragam intimidasi ISIS misalnya adalah contoh kasat mata yang bisa menjadi petunjuk jelas bahwa anak-anak muda mudah menjadi korban.

Semakin intensnya upaya kelompok-kelompok garis keras melakukan radikalisisasi pemikiran berhaluan eksklusif, maka negara harus semakin waspada dan antisipatif. Cara termudah dan dianggap ekonomis tapi strategis adalah upaya cegah tangkal melalui indoktrinasi pemikiran yang benar terhadap ideologi Pancasila.

Mungkin saja sebagian diantara komponen anak bangsa ada yang mencibir bahkan oposan terhadap praktik bela negara yang terkesan semi militeristik, itu sah-sah saja. Apalagi bila kritik mereka tanpa pemikiran alternatif. Itu sama saja, mengeryit muka di dahi, meludah wajah basah. Tidak ada yang bisa dipetik, sebab tak ada solusi yang ditampilkan.

Patut diingat, ancaman fisik mungkin TNI/ Polri di empat matra dengan mudah dapat mendeteksi. Tetapi jika sudah bicara non fisik apalagi kecanggihan *cyber attack* yang kemudian menggerus kesadaran kolektif bangsa terkait pertahanan dan keamanan ideologi, jelas situasi menjadi tidak mudah.

Militansi dan jiwa radikal tidak perlu jumlah banyak. Tetapi instabilitas politik dan ekonomi bisa diguncangkan melalui aksi teror yang sangat menakutkan. Sebelum itu

tumbuh semakin subur, maka deradikalisasi patut segera dilakukan. Agama menjadi wilayah yang paling rentan diinfiltrasi karena tipisnya kontrol negara pada ranah privat tersebut. Inilah yang sangat dikuatirkan. Maka pemahaman agama yang benar juga meniscayakan pendidikan agama diajarkan secara benar oleh narasumber yang benar. Ujaran kebencian dengan menistakan agama lain lebih rendah derajatnya, jelas bukti permulaan endapan pemikiran merekonstruksi kehidupan eksklusif. Mengingkari fakta bahwa bangsa ini pluralis sejak awalnya. Maka nasehat Rasul Paulus patut direnungkan, agar orang Kristen hidup sesuai dengan panggilannya (Filipi 1:27), agar Kristus memerintah di dalam hati orang Kristen (2 Korintus 13:5, Kolose 3: 15-16), dan agar orang Kristen menjadi surat Kristus yang tertulis yang bisa dibaca oleh setiap orang (2 Korintus 3: 2-3). Tuhan memanggil gereja-Nya untuk menguji diri apakah kehidupan eksternal telah sesuai dengan realitas internal? Jika belum, menjadi tugas dan tanggung jawab umat Kristiani bersama umat yang lain agar berperan lebih aktif lagi. Jangan menyerahkan bina umat kepada tangan yang salah. Maka sejatinya bela negara, bela bangsa dan bela agama harus dipastikan dalam koridor yang benar.

***Gatut Priowidodo, Ph.D** Ketua Pusat Kajian Komunikasi Petra (PKKP) dan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya.